



PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA-2023

A photograph of the BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) building in Padang, West Sumatra. The building is a modern, multi-story structure with a prominent sign that reads "BAPPEDA" in large red letters. The building is surrounded by greenery and a fence. The image is partially obscured by a large green geometric shape on the left side of the cover.

BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang

☎ 0751-7054555, 7054374

✉ bappedaprov@sumbarprov.go.id

🌐 bappeda.sumbarprov.go.id

📺 BAPPEDA Prov Sumatera Barat

📷 [bappeda.sumbar](https://www.instagram.com/bappeda.sumbar)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah ﷻ atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah selesai disusun.

Laporan tahunan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Laporan ini juga menjadi salah satu media dalam mempertanggungjawabkan alokasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Besar harapan Kami laporan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2023, dan menjadi bahan dalam penyempurnaan rencana kinerja pada tahun yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Gambaran Organisasi.....	2
1.4.1. Struktur Organisasi	2
1.4.2. Tugas Dan Fungsi Bappeda	5
1.4.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Badan	5
1.4.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat.....	6
1.4.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang P2EPD.....	6
1.4.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.....	7
1.4.2.5 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	8
1.4.2.6 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	9
1.4.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional	10
1.4.3. Cascading Kinerja	13
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023	17
2.1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2.1.1. Tujuan	17
2.1.2. Sasaran.....	17
2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18
2.3. Alokasi Anggaran.....	25
BAB III HASIL PELAKSANAAN	31
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran	31
3.2. Capaian Indikator Kinerja	51
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Rekomendasi.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2023	18
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD	19
Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Tahun 2023.....	35
Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2023.....	37
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	51
Tabel 3.2.2 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda.....	4
Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	13
Gambar 1.3 Cascading I Bappeda.....	14
Gambar 1.4 Cascading II Bappeda	15
Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda per Program	32
Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan per Program	33
Gambar 3.1.3 Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan per Program	33
Gambar 3.1.4 Grafik Persentase Realisasi Keuangan TA 2023 per Bidang	34
Gambar 3.1.5 Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dengan tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran dana APBD melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dengan DPA nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp. 20.843.951.679,-. Anggaran tersebut untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kemudian pada tanggal 16 November 2023 ditetapkan anggaran perubahan melalui Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 November 2023, dengan alokasi dana untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp. 19.162.519.700,-. Hasil akhir yang menjadi tujuan dengan tersedianya anggaran tersebut adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, maka disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2023 ini berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2023 ini adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilaksanakan masing-masing bidang sebagai evaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian sasaran program operasional tahunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang disediakan.
3. Bahan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2023 ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Program Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pemecahan masalah tersebut.
3. Rekomendasi tindak lanjut diperlukan sebagai acuan pokok dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun berikutnya.

1.4. Gambaran Organisasi

1.4.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

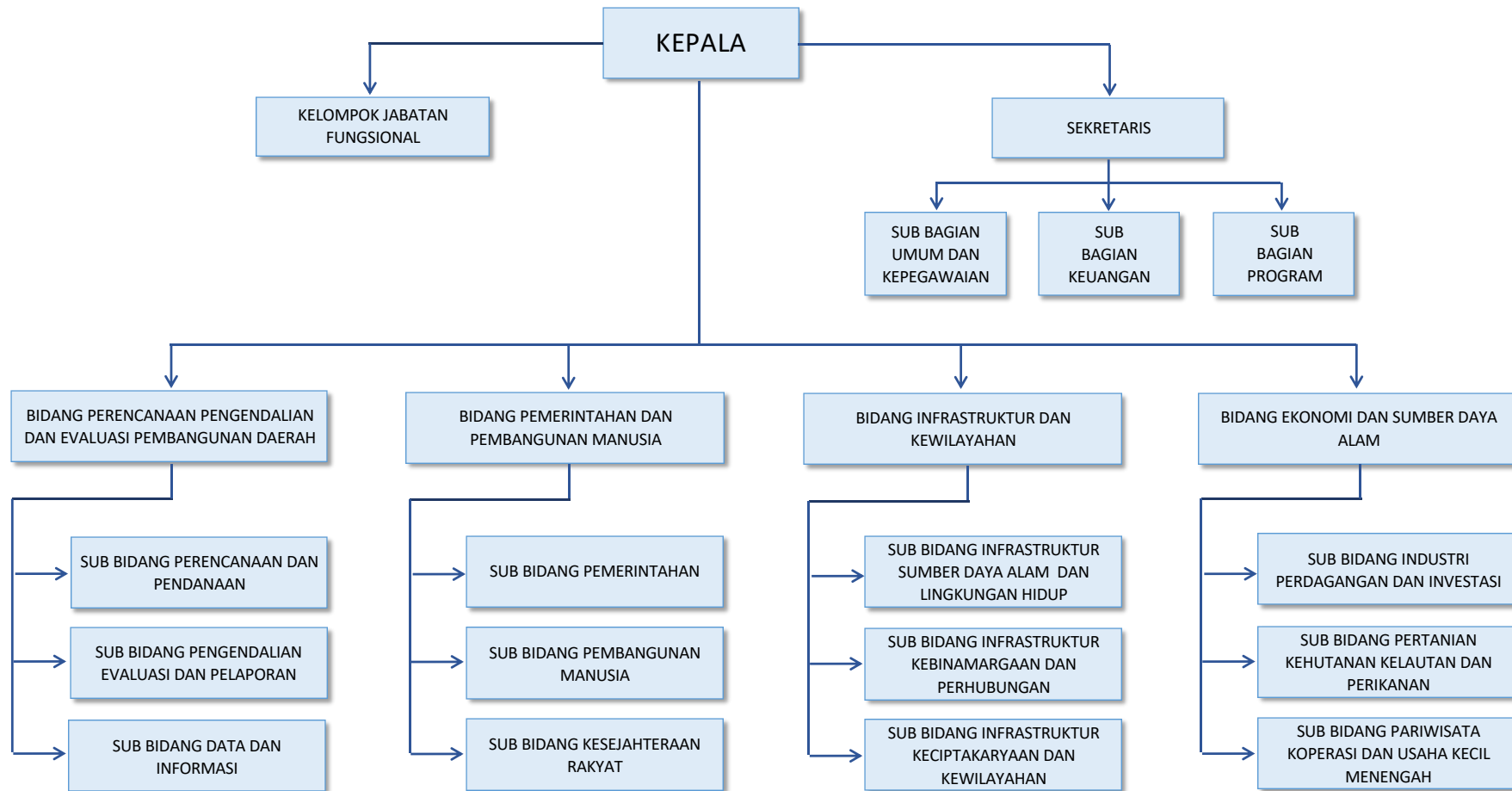
3. Sub Bidang Data dan Informasi.
- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan.
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- E. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi.
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
 3. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- a. Jabatan Kepala Badan, Eselon II.a
- b. Jabatan Sekretaris dan Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a
- c. Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- d. Jabatan Fungsional Perencana

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, terhitung mulai Januari 2022, dilaksanakan penyetaraan dua belas kepala sub bidang dan satu kepala sub bagian program menjadi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Dan saat ini sedang dilaksanakan pembahasan Peraturan Gubernur pengganti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda

1.4.2. Tugas Dan Fungsi Bappeda

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
- e. Pelaksanaan administrasi Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mengarahkan dan mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 tahun (RPJPD), dokumen jangka menengah daerah 5 tahunan (RPJMD) dan dokumen jangka pendek tahunan (RKPD).
- b. Mengarahkan, memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengarahkan penyelenggaraan fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota.
- d. Mengarahkan penyelenggaraan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) Kabupaten/Kota
- e. Membina dan mengarahkan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Badan.
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan.
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan.
- h. Mengarahkan dan mengkoordinir Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan stakeholder urusan pemerintahan Nasional, regional dan Daerah di bidang perencanaan.

- j. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan.
- k. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan.
- d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Badan.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan.
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi., dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- e. Penyelenggaran Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD.
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah.
- h. Pengelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah.
- i. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- j. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah.
- k. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- g. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- i. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- l. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.4.2.5 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- b. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif.
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- d. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.6 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi :
 - 1. Mengidentifikasi permasalahan.
 - 2. Merumuskan permasalahan.
 - 3. Mnventarisasi dan identifikasi data sekunder.
 - 4. Inventarisasi dan identifikasi data primer.
 - 5. Mengolah data dan informasi.
 - 6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data.
 - 7. Menganalisis data dan informasi.
 - 8. Menyajikan data dan informasi.
 - 9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana.
 - 10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan.
 - 11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
- b. Perencana Ahli Muda, meliputi :
 - 1. Memformulasikan sajian untuk analisis.
 - 2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan.

3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional.
5. Menguji alternatif kriteria dan model.
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral.
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional.
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral.
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan.
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

c. Perencana Ahli Madya, meliputi :

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis.
2. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah.
3. Merumuskan kebijakan/program strategis sektoral.
4. Mendisain program lintas sektoral.
5. Menyusun rencana pelaksanaan, Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP).
6. Menyusun rencana pembangunan sektoral.
7. Menyusun rencana pembangunan lintas sektor.
8. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.
9. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program.
10. Menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral.

d. Perencana Ahli Utama, meliputi :

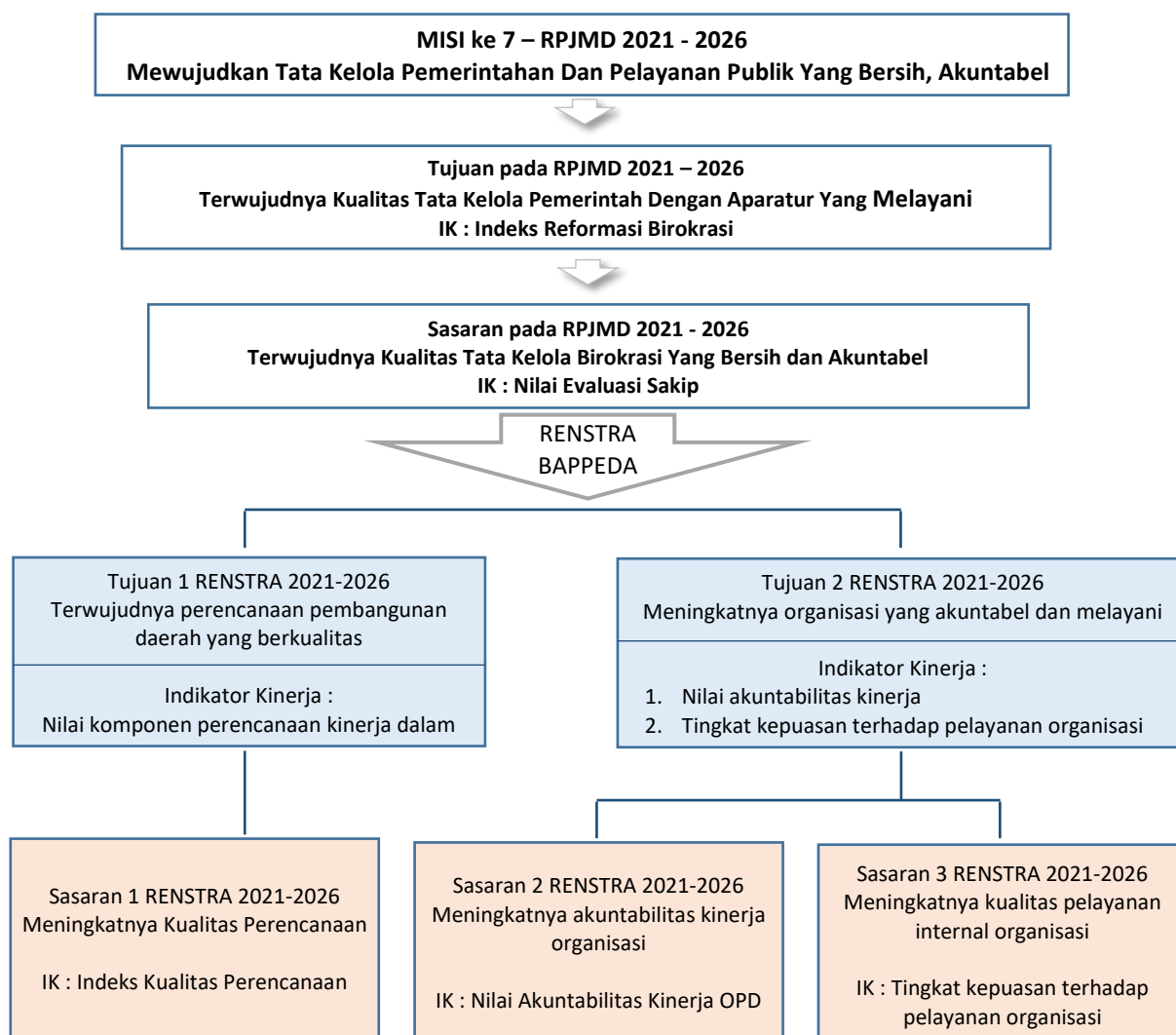
1. menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan.
2. menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang.
3. menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro.
4. mendisain program kawasan.
5. menyusun rencana pembangunan regional.
6. melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

7. melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis.
8. melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

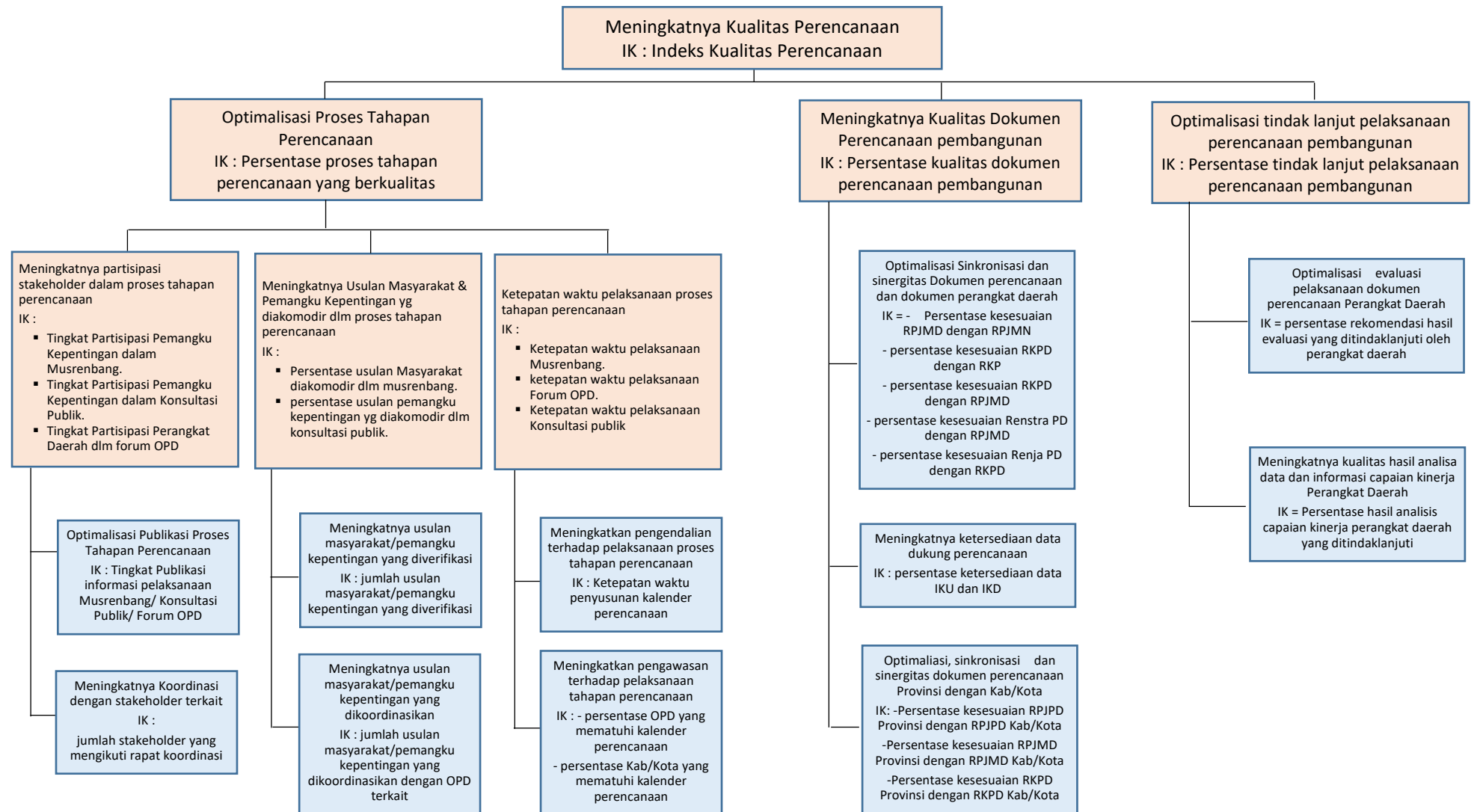
1.4.3. Cascading Kinerja

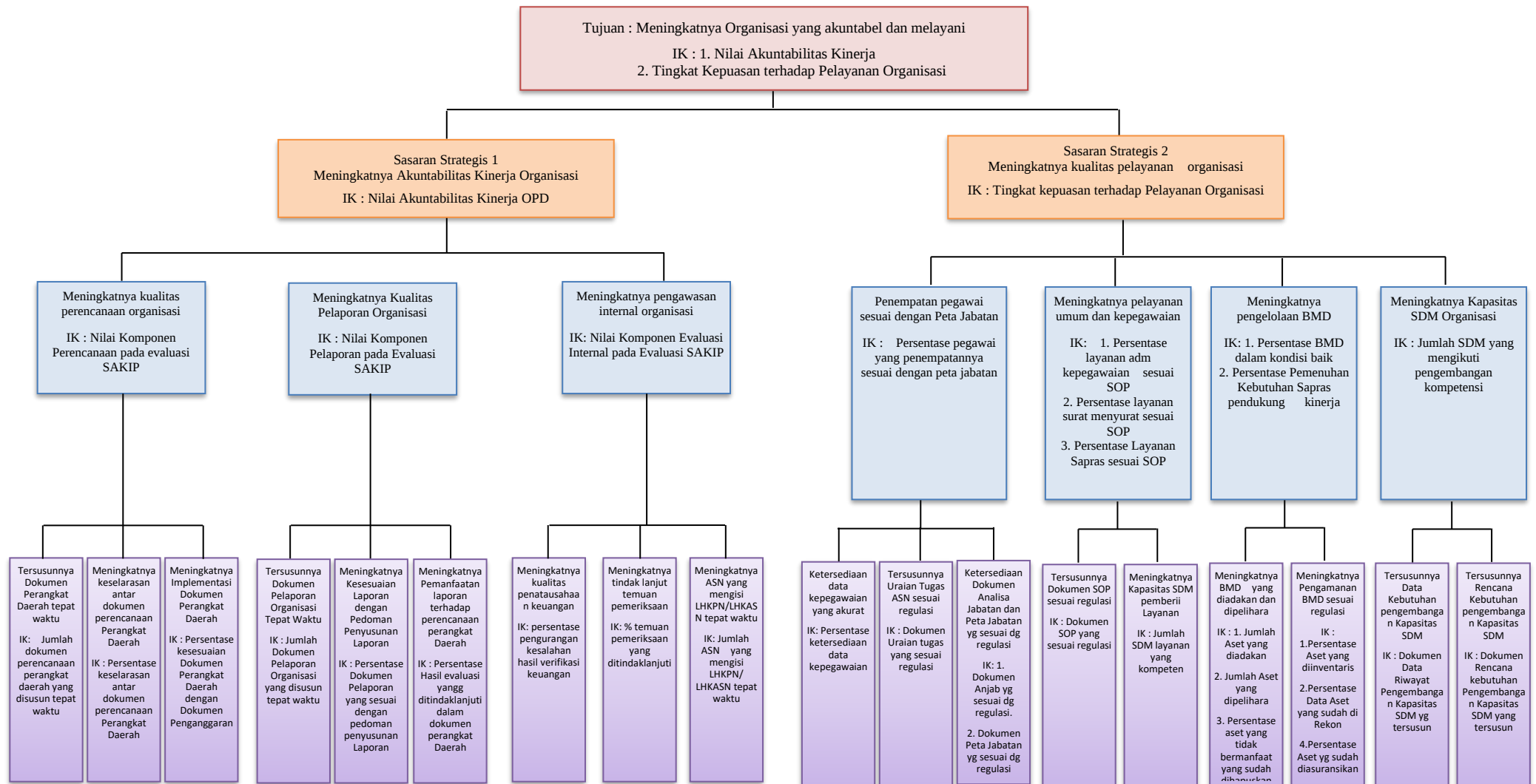
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut :

Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1.3 Cascading I Bappeda



Gambar 1.4 Cascading II Bappeda

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2023 yang memuat dasar hukum dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta tugas pokok dan fungsinya, Maksud dan Tujuan Laporan, Ruang lingkup penyusunan laporan disertai dengan batasan-batasan penulisan laporan agar lebih terarah, Gambaran Organisasi yang menggambarkan struktur organisasi beserta fungsinya yang juga dijabarkan dalam cascading kinerja, serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023

Bagian ini menguraikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah tertuang dalam dokumen Renja 2023 yang meliputi Tujuan dan Sasaran serta Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB III Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2023

Bagian ini menguraikan capaian indikator kinerja, realisasi penyerapan anggaran, kendala dan permasalahan dan penghargaan yang diterima pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun anggaran 2023.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

2.1. Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

Berdasarkan Misi ke 7 (tujuh) yang merupakan salah satu perwujudan dari visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas, dengan sasaran misi yang menjadi dasar tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2023, yang tertuang dalam Renstra Bappeda 2021 – 2026, yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

2.1.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Adapun sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86

Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2023

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.030.946.642	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	998.186.225	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.133.386.833	APBD

**Berdasarkan Perubahan APBD 2023*

2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari pencapaian visi misi Gubernur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2023, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merencanakan 3 program, yaitu (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan (3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 14 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Kemudian pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, 2 sub kegiatan dinilai tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian tujuan sehingga tidak dilaksanakan, oleh karena itu lingkup sub kegiatan Bappeda pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 menjadi 54 Sub Kegiatan. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Adapun ruang lingkup kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2023

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	81 Orang
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 Orang
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 Unit
7	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Penertiban	2 Dokumen
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	5 Laporan
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Jenis
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Jenis
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 Jenis
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan - Jumlah Rapat Koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	52 Jenis 15 kali
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Dokumen
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.	4 Orang
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
16	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Jenis
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan - Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	8 Rekening 2.660 m ³ 182.000 kwh
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 Orang
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 Unit
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59 Unit
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	1 Unit
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	55 Unit
VIII.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 Dokumen
25	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Kosultasi publik yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
26	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
27	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen
IX.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen
28	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
29	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen
X.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87%
30	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 Dokumen
31	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	41 Dokumen
XI.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	2 Dokumen
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	1 Rumusan
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen
37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Rumusan
38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
XII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	1 Rumusan
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 Dokumen
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	1 Rumusan
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah hasil sinergitas Bidang Sumber Daya Alam.	1 Laporan
XIII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	1 Rumusan
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Dokumen
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 Laporan

2.3. Alokasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 dan Perubahan DPA Nomor DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 20 November 2023, fokus kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.1	PERENCANAAN	20.843.951.679	19.162.519.700
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.781.162.929	17.030.946.642
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.868.100	75.590.250
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.160.600	32.148.750
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.707.500	43.441.500
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.531.883.971	11.134.886.770

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.207.234.721	10.927.128.520
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	273.359.250	169.654.250
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51.290.000	38.104.000
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.475.500	112.669.042
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	104.303.792
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	26.870.000	2.040.000
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500	6.325.250
5.1.1.1.04	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	294.705.500	0
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	274.625.000	0
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.080.500	0
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.176.695.574	2.641.657.734
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.004.000	23.802.400
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.408.500	75.183.050
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.518.840	154.496.820
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.110.032	143.959.100
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.695.654.202	1.959.216.364
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000	260.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.1.1.1.03	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.206.310.400	1.093.028.860
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	78.570.400	52.985.914
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.127.740.000	1.040.042.946
5.1.1.1.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.583.993.884	1.470.823.986
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.640.000	302.790.000
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.266.353.884	1.168.033.986
5.1.1.1.03	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.230.000	502.290.000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000	41.190.000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.000.000	292.210.000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.370.000	54.340.000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.800.000	74.200.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.870.000	40.350.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.438.429.000	998.186.225
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	879.971.000	775.011.175
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	65.200.000	45.630.500

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	307.169.000	245.818.200
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	507.602.000	483.562.475
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	234.651.500	79.103.750
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	126.378.500	25.368.950
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	108.273.000	53.734.800
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	323.806.500	144.071.300
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	207.176.000	57.029.800
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	116.630.500	87.041.500
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.624.359.750	1.133.386.833
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	582.981.100	474.718.500
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.511.800	45.471.800
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	37.350.000	35.954.500

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	54.268.200	40.663.350
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.417.500	12.317.500
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.638.100	38.150.600
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64.889.100	25.449.600
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	84.117.900	64.627.650
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	182.788.500	212.083.500
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	617.891.350	392.250.188
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.137.800	16.624.700
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.491.000	18.895.000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.423.800	67.016.800
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	123.778.300	134.402.988

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.565.350	15.211.600
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.714.900	22.075.900
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.391.900	92.567.900
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	114.388.300	25.455.300
5.01.03.1.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	423.487.300	266.418.145
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.076.900	51.885.900
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.891.900	22.561.845
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	149.690.800	64.391.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	18.771.600	13.034.500
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.762.700	6.765.700
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.943.300	22.309.100
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	90.350.100	85.470.100

3.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran

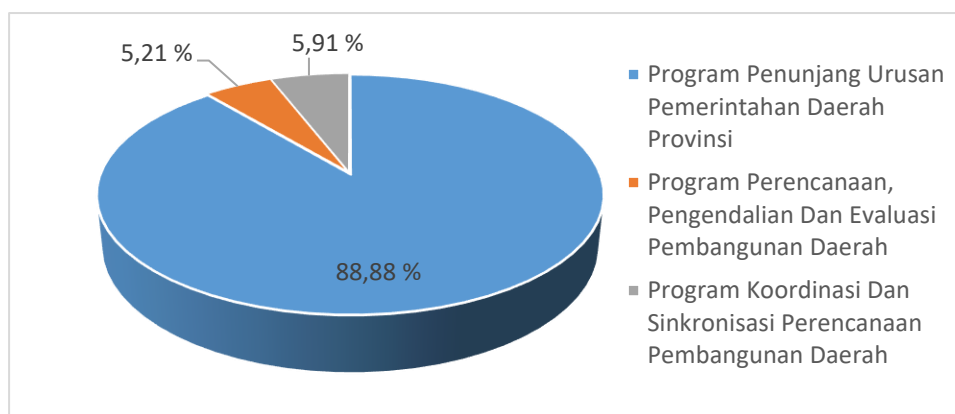
Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 hingga akhir tahun secara fisik telah mencapai 100% dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 18.915.107.604,- atau sebesar 98,71% dari total DPA TA 2023. Anggaran tersebut tersebar dalam tiga program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kinerja masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp. 17.030.946.642,- (88,88 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 98,76% atau sebesar Rp. 16.819.340.904,-. Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Indikator program ini adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100 %.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 998.186.225,- (5,21% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 99.60 % atau sebesar Rp. 994.211.050,-. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator program ini adalah Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Sesuai Dengan Target Dan Waktu Yang Ditetapkan Dalam Dokumen RPJMD Provinsi dengan target sebesar 87 % dan realisasi sampai akhir desember 2023 sebesar 72,57 %. Belum tercapainya target indikator ini disebabkan beberapa data kinerja makro yang menjadi dasar perhitungan belum tersedia pada bulan Desember 2023 dan baru bisa didapatkan pada minggu pertama Februari 2024.

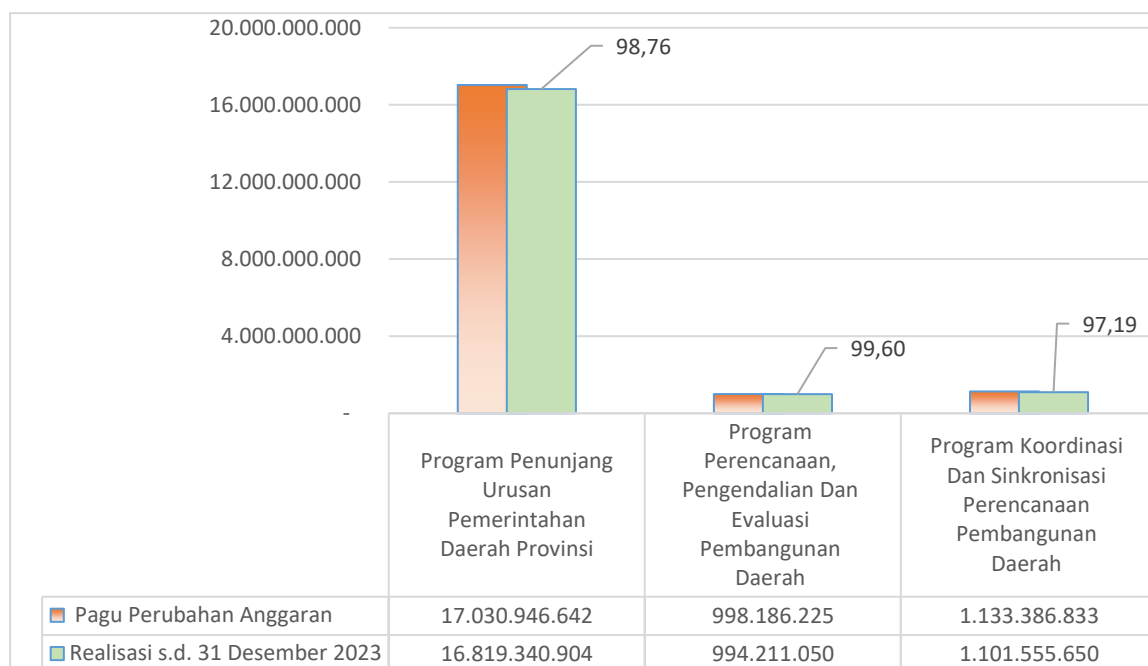
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Bidang PPM, Bidang Ekonomi & SDA dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pagu anggaran pada TA 2023 sebesar Rp. 1.133.386.833,- (5,91% dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2023), memiliki realisasi keuangan sebesar 97,19 % atau sebesar Rp. 1.101.555.650,-. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Efektivitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dengan target 60 % dan realisasi sebesar 82,15 %.

Persentase jumlah anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2023 per Program. Sementara untuk realisasi keuangan masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 3.1.2 Grafik Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2023 per Program, serta untuk perkembangan realisasi keuangan pada masing-masing program triwulan I sampai triwulan IV dapat dilihat pada Gambar 3.1.3 Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2023 Per Program.

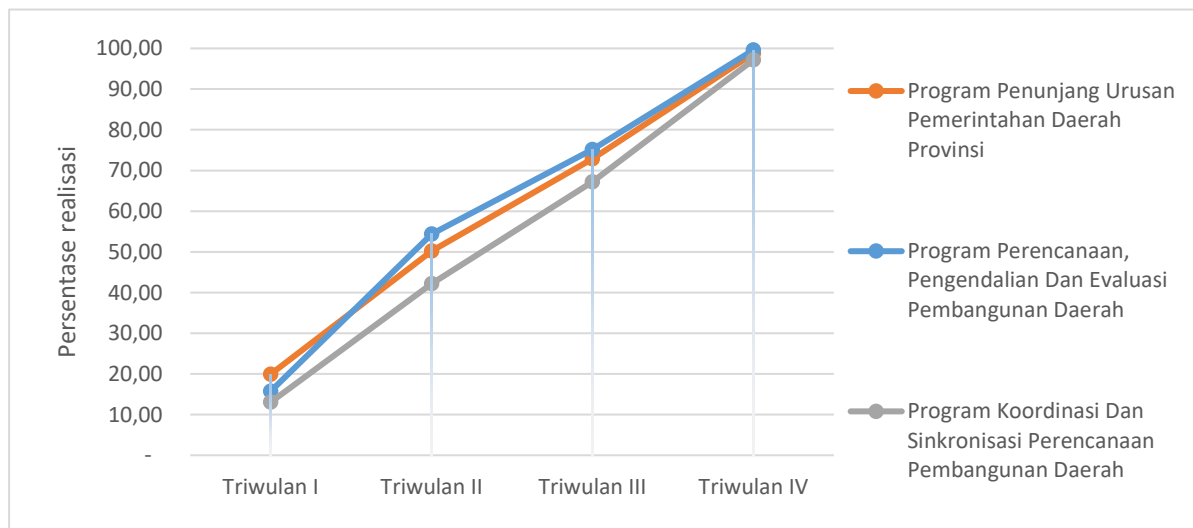
Gambar 3.1.1
Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2023 per Program



Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2023 per Program



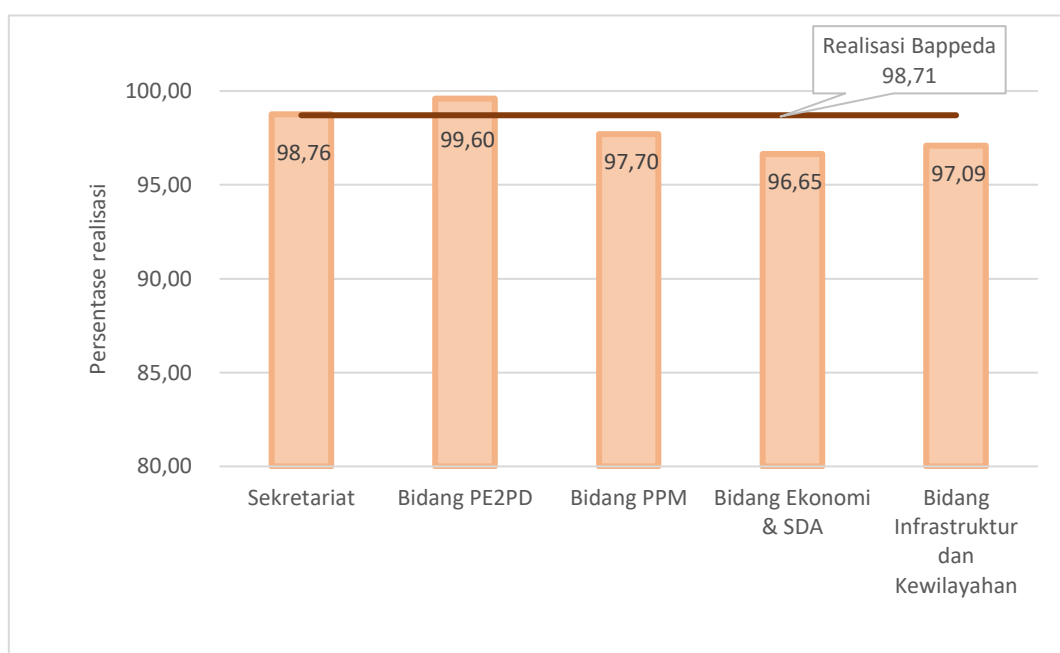
Gambar 3.1.3 Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2023 per Program (Dalam Persen)



Jika dilihat dari perspektif bidang lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat, secara umum kinerja keuangan masing-masing bidang hingga akhir Desember 2023 mencapai diatas 96 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini menandakan kinerja masing-masing bidang dapat optimal dalam memanfaatkan alokasi anggaran yang telah direncanakan. Serapan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp.17.030.946.642,-, sampai dengan akhir Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.16.819.340.904,- atau sebesar 98,76 % dari alokasi anggaran.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp.998.186.225,-, sampai dengan akhir Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.994.211.050,- atau sebesar 99,60 % dari alokasi anggaran.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp.474.718.500,-, sampai dengan akhir Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.463.788.150,- atau sebesar 97,70 % dari alokasi anggaran.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp.392.250.188,-, sampai dengan akhir Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.379.098.150,- atau sebesar 96,65 % dari alokasi anggaran.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada DPA Tahun 2023 sebesar Rp.266.418.145,-, sampai dengan akhir Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.258.669.350,- atau sebesar 97,09 % dari alokasi anggaran.

**Gambar 3.1.4 Grafik Persentase Realisasi Keuangan
TA 2023 per Bidang**

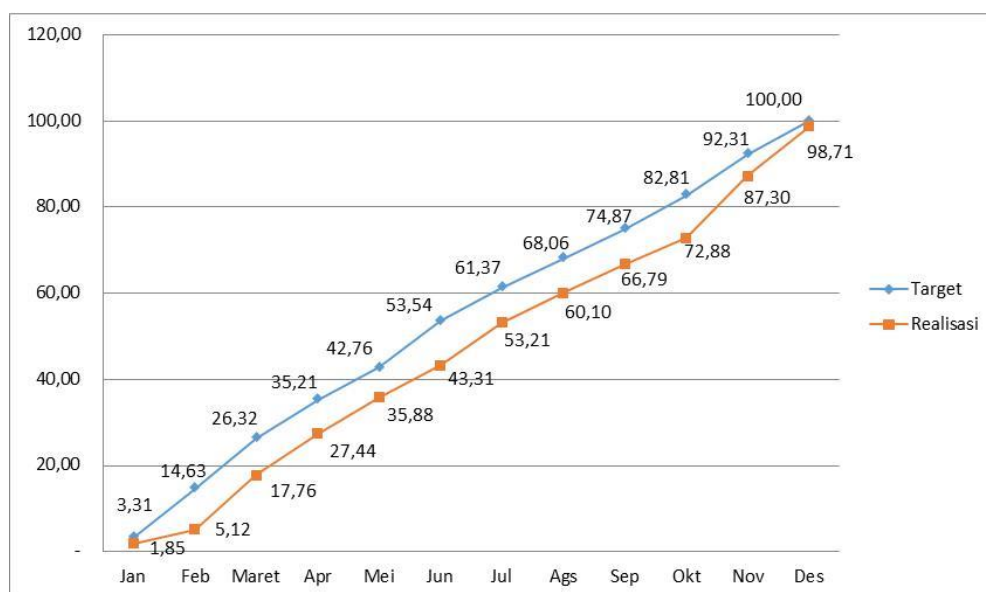


**Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Tahun 2023
Bappeda Provinsi Sumatera Barat per Bidang**

No	Bidang	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Triwulan IV	Persentase Realisasi
1	Sekretariat	17.030.946.642	16.819.340.904	98,76
2	Bidang PE2PD	998.186.225	994.211.050	99,60
3	Bidang PPM	474.718.500	463.788.150	97,70
4	Bidang Ekonomi dan SDA	392.250.188	379.098.150	96,65
5	Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	266.418.145	258.669.350	97,09
Total Anggaran		19.162.519.700	18.915.107.604	98,71

Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada gambar 3.1.5 berikut :

Gambar 3.1.5 Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 belum mencapai target penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya, hingga pada akhir triwulan di bulan Desember 2023 gap tersebut semakin kecil yaitu sebesar 1,29%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing bidang di lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi anggaran yang dibuat. Untuk memperbaiki

keadaan ini, sangat dibutuhkan komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga mampu melakukan penyerapan anggaran dengan optimal mendekati target yang direncanakan

Potret serapan anggaran berdasarkan masing-masing sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01	PERENCANAAN			19.162.519.700		18.915.107.604		98,71
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	17.030.946.642	100 %	16.819.340.904	100,00	98,76
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	75.590.250	100 %	72.692.000	100,00	96,17
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	32.148.750	6 Dokumen	31.728.250	100,00	98,69
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	43.441.500	8 Dokumen	40.963.750	100,00	94,30
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	11.134.886.770	100 %	11.072.355.763	100,00	99,44
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	81 orang	10.927.128.520	81 orang	10.866.478.513	100,00	99,44
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	10 orang	169.654.250	10 Orang	167.774.250	100,00	98,89

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen	38.104.000	13 Dokumen	38.103.000	100,00	100,00
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	112.669.042		111.049.380	100,00	98,56
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 unit	104.303.792	11 Unit	104.270.880	100,00	99,97
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Penertiban	2 dokumen	2.040.000	2 Dokumen	2.040.000	100,00	100,00
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5 Laporan	6.325.250	5 Laporan	4.738.500	100,00	74,91
5.1.1.1.04	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-	-	-
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		-	-	-	-	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	100 %	2.641.657.734	100 %	2.562.763.946	100,00	97,01
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Jenis	23.802.400	24 Jenis	23.792.200	100,00	99,96
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 jenis	75.183.050	6 Jenis	42.214.053	100,00	56,15
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 jenis	154.496.820	13 Jenis	148.747.379	100,00	96,28
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan - Jumlah Rapat Koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	62 Jenis 13 kali	143.959.100	58 Jenis 13 kali	134.846.900	100,00	93,67
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis	25.000.000	11 Jenis	25.000.000	100,00	100,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 Dokumen	1.959.216.364	4 Dokumen	1.928.163.414	100,00	98,42

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.	4 Orang	260.000.000	4 Orang	260.000.000	100,00	100,00
5.1.1.1.03	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	1.093.028.860		1.091.447.000	100,00	99,86
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 jenis	52.985.914	1 Jenis	52.947.000	100,00	99,93
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	1.040.042.946	3 Unit	1.038.500.000	100,00	99,85
5.1.1.1.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.470.823.986		1.435.686.047	100,00	97,61
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan - Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	8 Rekening 2.660 m ³ 182.000 kwh	302.790.000	8 Rekening 1.291 m ³ 99.193 kwh	284.792.317	100,00	94,06
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 orang	1.168.033.986	27 orang	1.150.893.730	100,00	98,53

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.03	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	502.290.000	100 %	473.346.768	100,00	94,24
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	1 Unit	38.735.578	100,00	94,04
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	292.210.000	10 Unit	288.977.880	100,00	98,89
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59 unit	54.340.000	48 Unit	51.642.510	100,00	95,04
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	74.200.000	1 Unit	63.383.800	100,00	85,42
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	55 unit	40.350.000	55 Unit	30.607.000	100,00	75,85
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	998.186.225	72,57 %	994.211.050	83,41 %	99,60

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	775.011.175	2 Dokumen	772.873.700	100,00	99,72
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	45.630.500	1 dokumen Berita Acara	45.608.250	100,00	99,95
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	245.818.200	1 dokumen Berita Acara	245.608.950	100,00	99,91
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	483.562.475	2 Dokumen	481.656.500	100,00	99,61
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 dokumen	79.103.750	2 Dokumen	79.084.050	100,00	99,98
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	25.368.950	1 Dokumen	25.356.750	100,00	99,95

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	53.734.800	1 Dokumen	53.727.300	100,00	99,99
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 %	144.071.300	87 %	142.253.300	100,00	98,74
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	57.029.800	2 Dokumen	57.012.800	100,00	99,97
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	41 dokumen	87.041.500	41 Dokumen	85.240.500	100,00	97,93
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Efektifitas Sub pada RPKD yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	1.133.386.833	82,15 %	1.101.555.650	136,91 %	97,19

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	474.718.500	2 dokumen	463.788.150	100,00	97,70
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya	2 dokumen	45.471.800	2 dokumen	42.426.050	100,00	93,30
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	1 rumusan	35.954.500	1 rumusan	34.821.750	100,00	96,85
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	40.663.350	1 Laporan	40.064.550	100,00	98,53

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	12.317.500	1 Laporan	11.498.000	100,00	93,35
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	38.150.600	2 Dokumen	37.733.100	100,00	98,91
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	1 rumusan	25.449.600	1 rumusan	24.987.850	100,00	98,19
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	64.627.650	1 Laporan	61.184.400	100,00	94,67

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	212.083.500	1 Laporan	211.072.450	100,00	99,52
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	392.250.188	2 dokumen	379.098.150	100,00	96,65
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	16.624.700	2 dokumen	15.990.700	100,00	96,19
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	1 rumusan	18.895.000	1 rumusan	17.774.000	100,00	94,07

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	67.016.800	1 Laporan	58.458.700	100,00	87,23
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	134.402.988	1 Laporan	133.170.950	100,00	99,08
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	15.211.600	2 dokumen	15.191.600	100,00	99,87
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	1 rumusan	22.075.900	1 rumusan	22.056.900	100,00	99,91
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	92.567.900	1 Laporan	91.123.600	100,00	98,44

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	25.455.300	1 Laporan	25.331.700	100,00	99,51
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	266.418.145	2 dokumen	258.669.350	100,00	97,09
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	51.885.900	2 dokumen	50.469.350	100,00	97,27
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	1 rumusan	22.561.845	1 rumusan	22.422.950	100,00	99,38

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	64.391.000	1 Laporan	61.837.550	100,00	96,03
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	13.034.500	1 Laporan	12.945.500	100,00	99,32
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	6.765.700	2 dokumen	6.158.700	100,00	91,03
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 laporan	22.309.100	1 rumusan	20.670.200	100,00	92,65

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Perubahan APBD Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	85.470.100	1 Laporan	84.165.100	100,00	98,47

Dari 54 sub kegiatan hanya terdapat 5 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD, dari anggaran Rp 6.325.250,- terealisasi Rp 4.738.500,- dengan capaian 74,91%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah adanya ketidaktepatan dalam memperkirakan belanja pada saat perubahan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran pada belanja penggandaan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari anggaran Rp 75.183.050,- terealisasi Rp 42.214.053,- dengan capaian 56,15%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah tidak terlaksananya pembelian 4 unit infokus yang disebabkan ketidaksesuaian harga di pasaran dengan DPA, dalam hal ini harga dalam DPA terlalu rendah untuk spesifikasi produk yang sama.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari anggaran Rp 74.200.000,- terealisasi Rp 63.383.800,- dengan capaian 85,42%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah efisiensi atas belanja pemeliharaan.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari anggaran Rp 40.350.000,- terealisasi Rp 30.607.000,- dengan capaian 75,85%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah efisiensi atas belanja pemeliharaan.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dari anggaran Rp 67.016.800,- terealisasi Rp 58.458.700,- dengan capaian 87,23%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah tidak dilaksanakannya monev program unggulan karena substansi monev sudah tersampaikan pada rapat koordinasi bersama tim gabungan.

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga akhir Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	79,97
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	83	96,93

Hingga akhir Tahun 2023, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur melalui tiga dimensi, yaitu :
 - a. Dimensi Proses,
 - b. Dimensi Isi
 - c. Dimensi Tindak Lanjut

sampai desember 2023 capaian indikator ini adalah 79,97. Angka capaian tersebut belum bersifat final karena data kinerja makro (Indikator Kinerja Utama) yang menjadi salah satu dasar perhitungan belum tersedia pada bulan Desember 2023 dan baru bisa didapatkan pada minggu pertama Februari 2024. Untuk lebih detailnya mengenai Indek Kualitas Perencanaan dapat dilihat pada tabel 3.2.2. Capaian Indek Kualitas Perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat untuk tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi inspektorat mendapat nilai 81,73 dengan kategori A.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Desember 2023 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 96,93 % dari total 4.498 responden yang memberikan penilaian sepanjang tahun 2023.

**Tabel 3.2.2 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan
Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Hasil
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	2,71
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	2,71
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	2,46
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	1,44
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	2,00
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	-
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	3,89
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	0,25
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	3,00
				Pelaksanaan Musrebang	3,00%	3,00
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	8,00
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	7,00
		Konsistensi	20,00%	Keselaran Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	10,00
				konsistensi anggaran per Program antara	10,00%	2,72

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Hasil
				RKPD dengan RPJMD		
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	5,00
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	5,04
				Persentase capaian IKD	7,00%	5,75
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	10,00
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	5,00
Jumlah	100,00%					79,97

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Serapan belanja APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai Rp. 18.915.107.604,- atau 98,71 % terhadap total anggaran dengan realisasi fisik 100 %. Hasil ini telah sesuai dengan harapan, dimana seluruh indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang direncanakan.
2. Sasaran strategis Bappeda Sumatera Barat yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan tiga indikator kinerja capaiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur melalui tiga dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut, capaian indikator ini adalah 79,97, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 77.
 - b. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Sumatera Barat untuk tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi inspektorat mendapat nilai 81,73 dengan kategori A, melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 79,25.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Desember 2023 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 96,93 % dari total 4.498 responden yang memberikan penilaian sepanjang tahun 2023. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 83.

4.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan, antara lain:

1. Program dan Kegiatan harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat dalam DPA.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada serta memperhatikan hasil revidi inspektorat dan BPK.
3. Pelaksanaan kegiatan harus fokus terhadap keluaran yang dihasilkan, baik itu tingkat sub kegiatan, kegiatan dan program.

4. Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Perencanaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan publikasi tahapan perencanaan serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan APBD Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD TA 2023 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sekaligus sebagai referensi untuk kegiatan yang akan datang.